

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH E-RUPS
PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh:

GHEA RIZKY OLVIA

NIM. 2220216320022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2024

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH E-RUPS
PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

GHEA RIZKY OLVIA

NIM. 2220216320022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2024

TESIS

ini telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal ... **15 Juli 2024**

PEMBIMBING



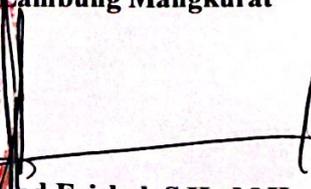
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19756015 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghea Rizky Olvia, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2220216320022
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Ghea Rizky Olvia, S.H.
N.I.M. 2220216320022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 284UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Ghea Rizky Olvia

Dengan Judul Tesis :

Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Risalah E-RUPS Perusahaan Terbuka Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

**Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.**

Banjarmasin, 16 Juli 2024

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



RINGKASAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Ghea Rizky Olvia¹, Saprudin,²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman
Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Risalah Rapat, e-RUPS, Perusahaan
Terbuka, Asas Kepastian Hukum

Melalui Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan peluang terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Bagi Perusahaan Terbuka (Emiten yang melakukan penawaran umum bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik) pelaksanaan RUPS nya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), sedangkan pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam pelaksanaan dan pembuatan akta risalah e-RUPS Perusahaan Terbuka dari adanya konflik norma pada Pasal 77 ayat (4) UU-PT dan Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020 serta menganalisis kewenangan Notaris dalam menjamin kepastian hukum terhadap keabsahan akta risalah e-RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan Pasal 9 POJK 16/2020 mengenai ketidakhadiran peserta rapat secara fisik dan berdasarkan pada data elektronik yang dilekatkan pada minuta akta.

Adanya frasa “kondisi tertentu” pada ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020 yang memberikan peluang mengenai ketidakhadiran secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan e-RUPS masih belum dijelaskan secara detail dalam POJK 16/2020, sehingga menimbulkan kekaburan norma atau *vague norm* yang juga turut berdampak terhadap kewenangan Notaris dalam menjamin keabsahan akta yang dibuatnya, dikarenakan dalam konsep Undang-Undang Jabatan Notaris, harus ada unsur ‘Penghadap’, yaitu pihak yang berhadapan langsung dengan Notaris. Apabila ketentuan kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUN-P 2/2014, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

¹ NPM : 2220216320022

² Pembimbing

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Ghea Rizky Olvia³, Saprudin,⁴
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Risalah Rapat, e-RUPS, Perusahaan
Terbuka, Asas Kepastian Hukum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta risalah e-RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan asas kepastian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat preskriptif untuk menjawab isu hukum dengan menggunakan metode pendekatan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berlaku maupun dari berbagai teori serta pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 POJK 16/2020 mengenai ketentuan risalah rapat yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS sudah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 46 UUJN 30/2004 serta telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS), meskipun terdapat konflik norma antara POJK 16/2020 dan UU-PT 40/2007, namun POJK 16/2020 melalui UU 4/2023 ditempatkan sebagai ketentuan yang berlaku khusus (*lex specialis*) sementara UU-PT ditempatkan sebagai ketentuan yang berlaku umum (*lex generalis*).

Pasal 8 ayat (1) huruf b POJK 16/2020 telah memberikan asas kepastian hukum dan sejalan dengan norma yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P 2/2014, bahwa dalam setiap pembuatan akta notariil, kehadiran secara fisik antara Notaris, Penghadap dan saksi wajib dipenuhi. Dengan tidak adanya penjelasan detail mengenai “kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 POJK 16/2020, maka untuk memenuhi ketentuan bentuk risalah yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris, acuannya tetap harus tunduk pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan mengenai kehadiran fisik ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P 2/2014, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum, Notaris Pasar Modal perlu menyatakan dalam akta mengenai penyerahan data elektronik oleh Penyedia e-RUPS tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin keabsahan data elektronik pada pelaksanaan e-RUPS Perusahaan Terbuka.

³ NPM : 2220216320022

⁴ Pembimbing

**AUTHORITY OF NOTARY IN THE MAKING OF MINUTES OF
ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(E-GMS) FOR PUBLIC COMPANY BASED ON
PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY**

By:

Ghea Rizky Olvia⁵, Saprudin,⁶

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: *Authority of Notary, Minutes of Meeting, e-GMS, Public Company, Principle of Legal Certainty*

The purpose of this research is to analyze the authority of a notary in the making of minutes of e-GMS for public companies based on the principle of legal certainty using the research of type namely normative juridical. The characteristic of this research is prescriptive. The research findings indicate that the provisions in Article 12 of Regulation of Financial Services Authority (POJK 16/2020), which require minutes of meeting to be drawn up in the form of notarial deed by a notary without requiring signatures of the GMS participants, are in accordance with Article 46 of Notary Position Act (UUJN 30/2004). This alignment provides legal certainty for the authority of a notary in conducting Electronic General Meetings of Shareholders (e-GMS). Despite the conflict of norms between POJK 16/2020 and Limited Liability Company Act (UU-PT 40/2007), but POJK 16/2020 through Act 4/2023, is placed as a specific regulation (*lex specialis*) while UU-PT is treated as a general regulation (*lex generalis*). Article 8 paragraph (1) letter b of POJK 16/2020 upholds the principle of legal certainty and aligns with the norms in Article 16 paragraph (1) of UUJN-P 2/2014, which mandates the physical presence of the notary, the appearing parties, and witnesses in every notarial deed. Without detailed explanations of "certain conditions" as mentioned in Article 9 of POJK 16/2020, the requirement for minutes to be in the form of a notarial deed must adhere to the provisions of the Notary Position Act. If the physical presence requirement is not met, the deed in question will only have the evidentiary power of an unnotarized deed, as stated in Article 16 paragraph (9) of UUJN-P 2/2014. For supervision and law enforcement purposes, a Capital Market Notary must state in the deed that the submission of electronic data by the e-GMS Provider does not exempt them from the responsibility of ensuring the validity data during the e-GMS of public company.

Certified by,



⁵ Student Number: 2220216320022

⁶ Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah *e*-RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan Asas Kepastian Hukum”. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi mereka. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang selalu memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat segera menyelesaikan penelitian tesis.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Pembimbing tesis Penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat merampungkan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., Guru Besar sekaligus Ketua Dewan Penguji Tesis, yang telah banyak memberikan arahan, koreksi dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H., Guru Besar sekaligus Dewan Penguji Tesis, yang juga telah banyak memberikan arahan, koreksi dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staf Akademik Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ungkapan persembahan yang terdalam kepada:

1. Suami tercinta, dr. Jodi Nugraha, S.Ked., sumber kekuatan dan inspirasi Penulis, yang selalu memberikan cinta, semangat, pengertian dan doa tanpa batas. Terima kasih atas *ridho* yang diberikan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Banjarmasin serta telah banyak membantu Penulis dalam bertukar pikiran dan berbagi ilmu pengetahuan.
2. Ibunda Titi Jariah dan Ibunda Lilis Juariah beserta seluruh keluarga, yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang tak terhingga kepada Penulis.
3. Seluruh teman seperjuangan di Magister Kenotariatan, khususnya sahabat-sahabat '*ring-satu*' Penulis, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, tempat untuk berdiskusi serta berbagi suka duka selama masa studi.

Penulis hanya dapat mengirimkan doa semoga setiap kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan berkat dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan Penulis menerima dengan terbuka saran maupun kritik yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu hukum khususnya kenotariatan.

Hormat Penulis,

Ghea Rizky Olvia, S.H.
N.I.M. 2220216320022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	42
G. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN DAN PEMBUATAN AKTA RISALAH E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA DARI ADANYA KONFLIK NORMA PADA PASAL 77 AYAT (3) UU-PT DAN PASAL 12 AYAT (1) POJK 16/2020.....	50

	A. Kedudukan POJK 16/2020 dalam Pelaksanaan <i>e</i> -RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	50
	B. Kepastian Hukum terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan dan Pembuatan Akta Risalah <i>e</i> -RUPS Perusahaan Terbuka	60
BAB III	KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN AKTA RISALAH E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA	76
	A. Kewenangan Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Akta Risalah <i>e</i> -RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan Pasal 9 POJK 16/2020.....	76
	B. Kewenangan Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Akta Risalah <i>e</i> -RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan Data Elektronik yang Dilekatkan pada Minuta Akta	89
BAB IV	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		